

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KOTA MALANG**

## **(STUDI PADA KUBE WARATAMA 1 DI KELURAHAN BURING KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG)**

**Pranestiti Embanaras**

12040674002 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: [embanarasp@yahoo.com](mailto:embanarasp@yahoo.com)

**Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP**

0023097908 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: [wena\\_23979@yahoo.com](mailto:wena_23979@yahoo.com)

### **Abstrak**

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu program dinyatakan berhasil apabila masyarakat yang bersangkutan ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan pemerintah. Asumsi dasar pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan yaitu karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan. Begitu juga dalam menentukan keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, partisipasi anggota KUBE sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan program tersebut, sehingga tujuan dari program KUBE dapat tercapai dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang (Studi pada KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang (Studi pada KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) yang dilihat dari macam-macam partisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah cukup optimal. Namun, perlu adanya beberapa perbaikan dalam beberapa hal antara lain perlu adanya koordinasi jadwal rapat kembali bagi KUBE Waratama 1 agar semua anggota KUBE Waratama 1 dapat hadir, perlu adanya pembentukan kepengurusan kembali bagi KUBE Waratama 1 agar tidak terjadi penumpukan tanggungjawab pada satu pihak, perlu adanya sosialisasi kembali mengenai arti penting KUBE, perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang terjadwal dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan perlu adanya perhatian lebih dalam proses evaluasi di KUBE Waratama 1 sehingga partisipasi masyarakat selaku anggota KUBE Waratama 1 dapat lebih meningkat.

**Kata Kunci** : *Partisipasi Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*

### **Abstract**

Public participation is the main factor that determines the success of a development program undertaken by the government. A program is considered successful if the people concerned to participate actively in the development process of the government. The basic assumption of the importance of community participation in a community development program that is because those least aware of the problem being faced and the necessary requirements. Likewise, in determining the success of the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) program in KUBE Waratama 1 Buring Village Kedungkandang District of Malang City, KUBE member participation is needed to determine the success of the program, so that the objectives of the program can be achieved with good KUBE. This research purposes to determine and describe the Public Participation in the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program in Malang City (Studies on KUBE Waratama 1 Buring Village Kedungkandang District of Malang City).

This type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. The technique of making the data source in this research is using purposive sampling technique. Meanwhile, the focus of this study is the Public Participation in the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program in Malang City

(Studies on KUBE Waratama 1 Buring Village Kedungkandang District of Malang City) as seen from a variety of participation that participation in decision making, participation in the implementation, participation in decision benefits and participation in the evaluation.

The results showed that participation in the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) program is already quite optimal. However, the need for some improvements in terms of, among others, the need for coordination of meeting schedules back to KUBE Waratama 1 that all members of KUBE Waratama 1 may be present, the need for the establishment of the management of return for KUBE Waratama 1 to prevent the buildup of responsibility on the one hand, the need for re-socialization of the importance KUBE, the need for monitoring and evaluation activities are scheduled from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, and the need for more attention in the evaluation process at KUBE Waratama 1 so that the people's participation as a member of KUBE Waratama 1 can be further increased.

**Key Words** : *Public Participation, Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*

## PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Suatu program dinyatakan berhasil apabila masyarakat yang bersangkutan ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan pemerintah melalui program yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan suatu pembangunan. Seperti yang dikatakan Ndraha (Huraerah, 2011 : 10) dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, dan tahap evaluasi. Pada hakekatnya masyarakat bukan hanya menjadi obyek pembangunan, melainkan subyek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat dituntut untuk dapat mengurus semua kegiatan pembangunan yang ada di daerahnya dan berperan secara aktif dalam proses pembangunan.

Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Pengertian partisipasi tersebut didukung dengan pengertian sederhana yang dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi (2001:

201 - 202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat untuk melaksanakan dan terlibat dalam proses pembangunan dalam bentuk penyampaian pendapat, barang, ketrampilan, dan jasa.

Asumsi dasar pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan yaitu karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui masalah yang sedang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan. Segala sebab dan akibat yang terjadi dalam masyarakat mengenai suatu kejadian dalam masyarakat akan mampu diselesaikan dengan mencari solusi yang terbaik oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, masyarakat dianggap mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas untuk mencapai sasaran pembangunan masyarakat.

Salah satu program pemerintah yang membutuhkan partisipasi masyarakat adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE bagi fakir miskin telah menjadi sarana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) khususnya dalam peningkatan pendapatan, menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga fakir miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga fakir miskin, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program yang ada sejak tahun 1982 dan dirancang untuk menangani masalah kesejahteraan masyarakat bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tahun 2006 pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan penyelenggaraan program kelompok usaha bersama (KUBE). Jika pada tahun 2005 penyaluran bantuan kepada KUBE bersifat natura, melalui perantara, *top down*, terpusat, dan tanpa pendampingan, maka mulai tahun 2006 sudah dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Pada tahun 2007, penyempurnaan program terus dilakukan melalui kerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Tbk. Mulai tahun 2007, program Pemberdayaan Fakir Miskin yang telah disempurnakan akan mulai dilakukan. Salah satu perubahan nyata yang telah dilakukan adalah penyaluran bantuannya dilakukan langsung kepada KUBE dan melalui mekanisme perbankan yang bekerjasama dengan PT BRI Tbk. Bantuan tidak lagi bersifat natura (barang) yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui pihak ketiga, namun disediakan sendiri oleh anggota KUBE.

Tujuan secara umum dari pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara anggota KUBE dengan masyarakat sekitar.

Laporan Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional pada September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta. Sebanyak 1,62 juta dari angka itu merupakan penduduk miskin di perkotaan dan sisanya adalah penduduk miskin di pedesaan. Pada bulan Maret 2015 dibandingkan September 2014 naik sebesar 0,06 persen dan dari 12,28 persen pada September 2014 menjadi 12,34 persen pada Maret 2015. Angka kemiskinan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, saat ini masih menyisakan sekitar 4,8 persen atau sekitar 40.800 jiwa dari jumlah penduduk yang mencapai hampir 850 ribu jiwa.

KUBE di Kota Malang pertama dibentuk pada tahun 2013 dan tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Malang salah satunya adalah di Kecamatan Kedungkandang. Kelurahan Buring termasuk dalam wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang terbagi menjadi 9 Rukun Warga (RW) dan 38 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk pada bulan Januari 2014 11.810 jiwa, terdiri dari 5.831 laki-laki dan 5.979 orang perempuan. Jumlah Kepala Keluarga di kelurahan Buring sebanyak 3.448 KK. Sedangkan jumlah penduduk pada bulan November 2015 berjumlah 10.475 jiwa terdiri dari 5.175 laki-laki dan 5.300 orang perempuan. Mayoritas penduduknya dengan mata pencaharian di sektor pertanian, peternakan dan buruh.

Kondisi sosial ekonomi terkait Kepala Rumah Tangga Sasaran/ Miskin tercatat 435 KK dari jumlah KK seluruhnya adalah 3.448 KK atau 12,61 % yang mayoritas penduduknya mata pencahariannya sebagai petani dan buruh, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan skala prioritas yang diutamakan adalah kebutuhan dasar masyarakat terutama ketersediaan air bersih dan juga masih banyaknya ditemukan bangunan rumah tangga sasaran / miskin yang lantainya masih tanah  $\pm$  370 KK yang kurang sehat / kurang layak sebagai tempat tinggal, secara tidak langsung akan berdampak terhadap kualitas SDM. Mata pencaharian sebagian besar penduduk hanya sebagai petani/pekebun penggarap belum bisa mengentaskan mereka dari kemiskinan, sehingga Kepala Rumah Tangga Sasaran/ Miskin tercatat masih tinggi akibat dari pendapatan mereka yang rendah.

Kelurahan Buring memiliki 3 KUBE yaitu Waratama 1, Waratama 2, dan Waratama 3. Dari ketiga KUBE tersebut KUBE Waratama 1 merupakan KUBE lebih mudah diajak berkomunikasi dan mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh pendamping dibandingkan dengan kedua KUBE lain di kelurahan Buring.

KUBE Waratama 1 di Kelurahan Buring pertama kali dibentuk pada tahun 2015 pada bulan Juni. KUBE ini beranggotakan 10 orang yang memiliki usaha beragam. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KUBE Waratama 1 antara lain adalah adanya rapat yang diadakan setiap satu

bulan sekali yaitu setiap tanggal 3. Dalam rapat tersebut anggota KUBE Waratama 1 diharuskan untuk membayar dana inventaris, pinjaman dan anggota KUBE juga diwajibkan untuk menabungkan sejumlah uang sesuai dengan kemampuan yang nantinya akan diambil sebelum hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan rapat dilakukan dengan santai yang masing-masing anggota KUBE Waratama 1 saling bertukar pikiran untuk mengembangkan KUBE Waratama 1 dan untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi anggota KUBE lainnya.

Selama program ini berjalan, masih belum menunjukkan perkembangan yang optimal, hal tersebut terlihat dari berbagai permasalahan di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di KUBE Waratama 1, diantaranya seperti masih adanya beberapa anggota KUBE yang tidak hadir dalam rapat dan pendapatan mereka belum meningkat. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana partisipasi anggota KUBE Waratama 1 mengingat terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat kelurahan Buring khususnya anggota KUBE Waratama 1 salah satunya adalah tingkat pendidikan yang nantinya akan berpengaruh pada cara berpikir dan bernalar.

Latar belakang diatas menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam program KUBE. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Malang (Studi pada KUBE Waratama 1 di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”**

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di kota Malang (Studi pada KUBE Waratama 1 di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang kota Malang)?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan

Masyarakat di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

## **MANFAAT**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan ilmu administrasi negara khususnya studi tentang partisipasi masyarakat dalam suatu program

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pelatihan intelektual bagi mahasiswa, mempertajam daya pikir mahasiswa serta mampu meningkatkan kompetensi keilmuan yang telah dipelajari.

#### **b. Bagi KUBE Waratama 1**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan dalam partisipasi anggota KUBE Waratama 1

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Partisipasi**

#### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Menurut (Sastropoetra, 1988) partisipasi adalah keterlibatan-keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam satu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Selanjutnya Koentjaraningrat (2003), berpendapat bahwa partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut menentukan arah atau tujuan pembangunan, di mana ditekankan bahwa partisipasi itu adalah hak dan kewajiban bagi masyarakat. Affan (2007) memberikan pengertian bahwa partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota sistem sosial secara kolektif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012: 81) pengertian secara umum dapat ditangkap dari istilah

partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Webster, 1976 (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012: 81) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian dari kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012: 81).

## **2. Faktor-Faktor yang Mendorong Partisipasi**

Menurut Selamat dalam (Mardikanto dan Soebiato 2012:91-94) menyatakan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga faktor berikut:

### **a. Kesempatan untuk Berpartisipasi**

Banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Beberapa kesempatan yang dimaksud disini adalah:

- 1) Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan
- 2) Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan
- 3) Kesempatan untuk memperoleh teknologi yang tepat, termasuk peralatan atau perlengkapan penunjangnya
- 4) Kesempatan untuk berorganisasi termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan,

dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan

- 5) Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara masyarakat.

### **b. Kemampuan Untuk Berpartisipasi**

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Yang dimaksud kemampuan disini adalah:

- 1) Kemampuan untuk menemukan dan memenuhi kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).
- 2) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
- 3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

### **c. Kemauan Untuk Berpartisipasi**

Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya, yang menyangkut:

- 1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan
- 2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya
- 3) Sikap kebersamaan untuk selaluingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri.
- 4) Sikap kebersamaan untuk memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan

- 5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

### 3. Macam-Macam Partisipasi

Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi langsung  
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung  
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Sedangkan Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan  
Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat dan berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

- c. Partisipasi dalam Pelaksanaan  
Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.
- d. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat  
Partisipasi ini tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- e. Partisipasi dalam Evaluasi  
Partisipasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan suatu program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ada penyimpangan.

### 4. Jenis-Jenis Partisipasi

Menurut pendapat Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah (2011: 116) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jenis partisipasi ialah macamnya sumbangan yang diberikan orang atau kelompok yang berpartisipasi. Sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a. Partisipasi Buah Pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pendapat, pertemuan atau rapat
- b. Partisipasi Tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan

- desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya
- c. Partisipasi Harta Benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan kegiatan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya
  - d. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry
  - e. Partisipasi Sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian), kondangan, nyambungan dan mulang-sambung.

## 5. Motif Partisipasi Masyarakat

Menurut Billah seperti dalam kutipan dalam Taher (1967) dalam Huraerah (2011: 119), ada 5 motif partisipasi masyarakat yang bisa bekerja sendirian maupun bersamaan. Kelima motif tersebut adalah:

- a.) Motif Psikologi  
Kepuasan pribadi, pencapaian prestasi, atau rasa telah mencapai sesuatu dapat merupakan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan kegiatan, termasuk juga untuk berpartisipasi meskipun kegiatan atau partisipasinya itu tidak akan menghasilkan keuntungan
- b.) Motif Sosial  
Ada dua sisi motif sosial, yakni untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindarkan dari terkena pengendalian status sosial. Orang akan dengan senang hati berpartisipasi didalam suatu kegiatan (pembangunan) manakala keikutsertaannya itu akan membawa dampak meningkatnya status sosialnya. Pada sisi yang negatif, orang akan terpaksa berpartisipasi dalam suatu kegiatan (pembangunan) karena takut terkena sanksi sosial (tersisih atau dikucilkan oleh warga masyarakat)

## c.) Motif Keagamaan

Motif ini didasarkan pada kepercayaan kepada kekuatan yang ada diluar manusia (Tuhan; sesuatu yang gaib; supernatural). Agama sebagai ideologi sosial yang memiliki berbagai macam fungsi bagi pemeluknya, yaitu fungsi inspiratif, normatif, integratif dan operatif/ motivatif. Melalui aktualisasi fungsi-fungsi tersebut, agama dapat meningkatkan perannya didalam proses pembangunan, dan lebih dari itu agama dapat meningkatkan peran para pemeluknya dalam proses pembangunan.

## d.) Motif Ekonomi

Laba adalah motif ekonomi yang dapat dan bahkan seringkali efektif mendorong seseorang mengambil keputusan untuk ikut berpartisipasi didalam kegiatan (pembangunan). Pengambilan keputusan (yang bersifat ekonomis) dapat mengambil dua bentuk strategi, yaitu maksimum profit dan minimum profit. Dengan menggunakan tata nalar ekonomi, masyarakat akan memutuskan untuk berpartisipasi jika akan mendapatkan keuntungan. Setidaknya ia tidak akan rugi jika berpartisipasi atau paling tidak kerugian yang diperoleh dari partisipasi akan lebih kecil daripada kerugian karena tidak ikut berpartisipasi. Dasar utama motif politik adalah kekuasaan. Oleh karena itu, partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besar kecilnya kekuasaan yang dapat diperoleh dari partisipasinya didalam berbagai kegiatan (pembangunan).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di KUBE Waratama 1 kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang dengan fokus partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana subyek yang dipilih merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Adapun subyek dalam penelitian ini, yaitu: Pendamping KUBE Waratama 1 dan 5 anggota KUBE Waratama 1.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Malang**

Kota Malang merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian antara 440 sampai 667 di atas permukaan laut (dpl). Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah timur terdapat Gunung Semeru, dan di sebelah barat terdapat Gunung Kawi dan Panderman. Karena keberadaannya itu, Kota Malang dialiri oleh sungai Brantas, sungai Metro, sungai Bango, sungai Amprong dan sungai Sukun. Dengan luas wilayah mencapai 110,0566 km<sup>2</sup> Kota Malang merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian antara 440 sampai 667 di atas permukaan laut (dpl). Di sebelah utara terdapat Gunung Arjuno, di sebelah timur terdapat Gunung Semeru, dan di sebelah barat terdapat Gunung Kawi dan Panderman. Karena keberadaannya itu, Kota Malang dialiri oleh sungai Brantas, sungai Metro, sungai Bango, sungai Amprong dan sungai Sukun. Dengan luas wilayah mencapai 110,0566 km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2014 sebesar 865.306 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 432.308 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 432.998 jiwa. Jumlah penduduk Kota Malang pada 29 Februari 2016 jumlah penduduk Kota Malang sebesar 883.810 jiwa.

### **B. Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang**

Kedungkandang adalah salah satu kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kedungkandang merupakan salah satu wilayah kecamatan tertua di Kota Malang sebelum pemekaran wilayah Kota Malang pada dekade 80-an. Wilayah Kecamatan Kedungkandang mempunyai luas 39,89 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 kelurahan, 114 RW dan 858 RT. jumlah penduduk di Kecamatan Kedungkandang sebesar 182.313 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 90.630 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 91.683 jiwa.

### **C. Gambaran Umum Kelurahan Buring**

Kelurahan Buring merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Wilayah Kelurahan Buring memiliki luas sekitar 510 hektar yang terdiri dari 32 hektar tanah sawah, dan 477,7 hektar lahan kering atau 93,6 persen. Lahan kering tersebut merupakan sentra komoditi tanaman pangan berupa ubi kayu, jagung, hortikultura dan tebu. Secara administratif, Kelurahan Buring dikelilingi oleh Kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Kelurahan Buring terbagi menjadi 9 Rukun Warga (RW) dan 38 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk Kelurahan Buring pada bulan Januari 2014 11.810 jiwa, terdiri dari 5.831 laki-laki dan 5.979 orang perempuan. Jumlah Kepala Keluarga di kelurahan Buring sebanyak 3.448 KK. Sedangkan jumlah penduduk pada bulan November 2015 berjumlah 10.475 jiwa terdiri dari 5.175 laki-laki dan 5.300 orang perempuan.

### **D. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program yang ada sejak tahun 1982 dan dirancang untuk menangani masalah kesejahteraan masyarakat bagi Penyandang Masalah



Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tahun 2006 pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan penyelenggaraan program kelompok usaha bersama (KUBE). Jika pada tahun 2005 penyaluran bantuan kepada KUBE bersifat natura, melalui perantara, top down, terpusat, dan tanpa pendampingan, maka mulai tahun 2006 sudah dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Pada tahun 2007, penyempurnaan program terus dilakukan melalui kerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Tbk. Mulai tahun 2007, program Pemberdayaan Fakir Miskin yang telah disempurnakan akan mulai dilakukan. Salah satu perubahan nyata yang telah dilakukan adalah penyaluran bantuannya dilakukan langsung kepada KUBE dan melalui mekanisme perbankan yang bekerjasama dengan PT BRI Tbk. Bantuan tidak lagi bersifat natura (barang) yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui pihak ketiga, namun disediakan sendiri oleh anggota KUBE.

Kelompok Usaha Bersama merupakan media dan sekaligus metode dalam pemberdayaan sosial keluarga miskin perkotaan untuk menciptakan kesejahteraan sosial mereka. Disisi sosial, melalui KUBE keluarga miskin diarahkan untuk dapat berinteraksi sosial dan saling peduli satu sama lain dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Kemudian, dari sisi ekonomi melalui KUBE keluarga miskin diarahkan untuk memiliki sumber penghasilan yang tetap, layak dan berkelanjutan memiliki aset, terpenuhinya kebutuhan dasar dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial. Pembentukan KUBE didasarkan pada kedekatan tempat tinggal, jenis usaha dan ketrampilan anggota, ketersediaan sumber daya dan kondisi geografis, kondisi sosial budaya, memiliki motivasi yang sama dan diprioritaskan pada kelompok-kelompok yang sudah tumbuh di masyarakat.

Pembentukan KUBE didasarkan pada kedekatan tempat tinggal, jenis usaha dan ketrampilan anggota, ketersediaan

sumber daya dan kondisi geografis, kondisi sosial budaya, memiliki motivasi yang sama dan diprioritaskan pada kelompok-kelompok yang sudah tumbuh di masyarakat.

Tujuan yang akan dicapai dari pembentukan KUBE adalah:

1. Aspek Sosial, meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam hal:
  - a) Mengembangkan komunikasi dan relasi sosial yang baik dengan sesama anggota KUBE, dengan anggota keluarga dan dengan warga masyarakat
  - b) Meningkatkan partisipasi sosial anggota KUBE dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepedulian sosial untuk membantu orang lain
  - c) Menguatnya motivasi anggota KUBE untuk melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, termasuk kesadaran pentingnya pendidikan
2. Aspek Ekonomi, meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam hal:
  - a) Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi secara berkelanjutan
  - b) Peningkatan pendapatan
  - c) Peningkatan aset dan tabungan
  - d) Pemenuhan kebutuhan dasar
  - e) Aksesibilitas terhadap pelayanan sosial

#### **E. Gambaran Umum KUBE Waratama 1**

KUBE Waratama 1 adalah salah satu KUBE yang terletak di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. KUBE Waratama 1 memiliki seorang pendamping yang bernama Pak Vahis. KUBE Waratama 1 dibentuk pada bulan Juni 2015 dengan anggota kelompok sebanyak 10 orang anggota, KUBE Waratama 1 adalah salah satu KUBE yang terletak di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. KUBE Waratama 1 memiliki seorang pendamping yang bernama Pak Vahis. KUBE Waratama 1 dibentuk pada bulan Juni 2015 dengan

anggota kelompok sebanyak 10 orang anggota

**Tabel 4.1 Susunan Pengurus KUBE Waratama 1**

No.	Jabatan	Nama	Usaha
1.	Ketua	Ngatmini	Menjual Snack
2.	Sekretaris	Siti Mariamah	Warung Nasi
3.	Bendahara	Sri Rejeki	Penjahit
4.	Anggota	Bunadi	Rombeng
5.	Anggota	Wasih Anggraeni	Menjual Bakso
6.	Anggota	Sri Darwati	Menjual Snack
7.	Anggota	Choirul Hasanah	Menjual Gorden
8.	Anggota	Kartini	Menjual Kue Kering
9.	Anggota	Paidi	Menjual Gorengan
10.	Anggota	Anikwati	Menjual Snack

*Sumber: Proposal KUBE Waratama 1 Tahun 2105*

KUBE Waratama 1 memiliki jadwal pertemuan secara rutin setiap 1 bulan sekali yaitu setiap tanggal 3 pukul 18.30. Kegiatan rapat dilakukan secara bergiliran di masing-masing rumah anggota KUBE Waratama 1. Pemilihan rumah yang akan ditempati dalam rapat dilakukan dengan cara menggunakan lotre seperti arisan. Setiap pertemuan, anggota KUBE diwajibkan untuk membayar iuran sebagai uang kas atau IKS (Iuran Kesetiakawanan Sosial) sebesar Rp. 5000. Dana yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar Rp. 20.000.000 yang akan dibagi untuk 10 anggota KUBE. Dalam KUBE Waratama 1, uang yang bagikan hanyalah Rp. 1.000.000. Sisanya digunakan sebagai simpan pinjam, namun masing-masing anggota hanya menerima pinjaman Rp. 950.000 karena dari uang Rp. 1.000.000 jika melakukan pinjaman akan dipotong 5%. Tapi untuk pengembalian

setiap anggota KUBE harus membayar Rp. 100.000 setiap bulan. Kegiatan simpan pinjam tersebut dilakukan supaya uang yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat diputar atau dikembangkan sehingga tidak sekali habis. Untuk sisa uang atau uang administrasi tersebut akan dibagikan setiap 3 tahun sekali sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Penetapan SHU yang dibagikan selama 3 tahun sekali tersebut adalah saran dari pendamping KUBE Waratama 1, sehingga apabila diambil selama 3 tahun sekali SHU yang diberikan jumlahnya cukup banyak. Setiap rapat, anggota KUBE harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 105.000 ditambah dengan tabungan yang nominal menabungnya sesuai dengan kemampuan individu. Tabungan dan pinjaman bisa diambil ketika rapat terakhir sebelum lebaran sebagai tambahan modal usaha ketika lebaran datang, karena secara keseluruhan dagangan anggota KUBE Waratama 1 ramai ketika lebaran.

#### **F. Pembahasan**

Dalam pelaksanaan program KUBE yang dilakukan oleh pemerintah, dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota KUBE untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan suatu pembangunan. Pada hakekatnya masyarakat bukan hanya menjadi obyek pembangunan, melainkan subyek dari pembangunan itu sendiri. Seperti halnya di KUBE Waratama 1, partisipasi aktif yang dilakukan oleh anggota KUBE Waratama 1 sangat penting mengingat suatu program dibuat untuk kepentingan anggota KUBE Waratama 1 itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi anggota KUBE Waratama 1 dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), maka digunakanlah teori dari Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63), yaitu:

##### **1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat dan berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.

Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan (Cohen dan Uphoff yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 61-63)). Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di KUBE Waratama 1 ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat melalui bantuan modal usaha bagi fakir miskin yang mempunyai embrio usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota KUBE Waratama 1, masyarakat sebagai anggota KUBE telah berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan rapat seperti menyampaikan pendapat atau argumen mereka dan penolakan terhadap suatu keputusan yang akan disepakati bersama. Dari beberapa anggota KUBE Waratama 1 yang telah diwawancarai mengatakan bahwa mereka selalu hadir dalam kegiatan rapat KUBE. Dari 10 anggota KUBE Waratama 1 hanya 2 orang anggota saja yang sering tidak hadir dalam kegiatan rapat KUBE. Hal tersebut didukung dengan hasil observasi yang telah dilakukan yaitu pada saat kegiatan rapat KUBE pada tanggal 03 Januari 2016 anggota KUBE yang tidak hadir 3 orang yaitu Ibu Anikwati, Ibu Siti Mariamah dan Ibu Paidi, kemudian pada rapat kedua yaitu tanggal 03 Maret 2016 anggota KUBE yang tidak hadir 2 orang yaitu Ibu Anikwati dan Ibu Siti Mariamah.

Terdapat anggota KUBE Waratama 1 lain yang mengatakan bahwa beliau tidak pernah menyampaikan pendapat apapun dan

cenderung lebih memilih untuk menurut saja dengan pendamping KUBE yaitu Ibu Choirul Hasanah. Dalam kegiatan rapat KUBE, beliau memang tidak pernah menyampaikan pendapat atau menyampaikan permasalahan mengenai usaha beliau dan beliau cenderung diam dan hanya hadir saja.

Hal tersebut dibenarkan dengan pernyataan dari pendamping KUBE Waratama 1 yaitu Pak Vahis bahwa kebanyakan pendapat beliau yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan di KUBE Waratama 1. Anggota KUBE tidak banyak tahu tentang KUBE terutama tata pelaksanaannya. Sebagai pendamping KUBE, Pak Vahis selalu berusaha untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk anggota KUBE.

## **2. Partisipasi dalam Pelaksanaan**

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Dalam pelaksanaan suatu program memiliki ruang lingkup antara lain yang pertama adalah menggerakkan sumber daya dan dana, yang kedua kegiatan administrasi dan koordinasi dan yang ketiga adalah penjabaran program (Cohen dan Uphoff dalam (Siti Irene Astuti D (2011: 61-63)).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada bendahara KUBE Waratama 1, mengatakan bahwa dana yang didapatkan dari Kemensos RI adalah sebesar Rp. 20.000.000. Namun tidak sepenuhnya dana tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada anggota KUBE. Dana Rp. 10.000.000 akan diberikan kepada anggota KUBE secara cuma-cuma sebagai uang untuk menambah modal usaha mereka sehingga masing-masing anggota menerima Rp. 1000.000. Untuk sisanya, uang tersebut digunakan dengan sistem pinjaman sehingga anggota KUBE Waratama 1 mempunyai tanggung

jawab untuk mengembalikan yang tersebut dengan aturan setiap bulan membayar cicilan Rp. 100.000. Namun, dalam penerimaan uang pinjaman Rp. 1.000.000 tersebut, anggota KUBE Waratama 1 harus membayar bunga sebesar 5% dari Rp. 1000.000, sehingga masing-masing anggota menerima Rp. 950.000. Selain itu, anggota KUBE Waratama 1 juga diharuskan untuk membayar dana inventaris sebesar Rp. 5000. Dana inventaris atau IKS digunakan untuk dana sosial ketika terdapat keluarga salah satu anggota KUBE sakit yaitu sebesar Rp.2000. Sedangkan sisanya digunakan untuk anggota KUBE yang terpilih untuk menyediakan tempat rapat sebagai dana untuk makanan dan minuman. Jika ditotal, anggota KUBE Waratama 1 diharuskan membayar Rp. 105.000 setiap satu bulan sekali pada saat rapat berlangsung.

Terdapat salah satu anggota yang mengatakan bahwa selain membayar Rp. 105.000 setiap bulan, mereka juga menabung. Tabungan dan uang pinjaman dapat diambil ketika lebaran tiba, sehingga anggota KUBE dapat tambahan dana untuk modal usaha yang cukup banyak pada saat lebaran akan tiba. Untuk beberapa anggota yang tidak hadir dalam kegiatan rapat menitipkan uang mereka kepada anggota lain, seperti Ibu Siti Mariamah yang menitipkan uang beliau kepada Ibu Darwati.

Menurut salah satu anggota KUBE Waratama 1, adanya rapat KUBE ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan mengenai usaha mereka secara bersama-sama. Keikutsertaan dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983 dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012: 81).

### **3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat**

Partisipasi ini tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Cohen dan Uphoff dalam (Siti Irene Astuti D (2011: 61-63)).

Dalam program KUBE khususnya KUBE Waratama 1 dikatakan mampu mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat dapat memperoleh manfaat dari adanya KUBE ini seperti peningkatan pendapatan. Menurut Webster, 1976 (dalam Mardikanto dan soebiato, 2012: 81) partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Berdasarkan wawancara kepada anggota KUBE Waratama 1, mereka merasakan adanya perubahan pendapatan mereka yaitu meningkatnya pendapatan selama adanya program KUBE ini. Sebelumnya pendapatan yang mereka hasilkan tidak lebih besar setelah adanya KUBE ini. Anggota KUBE Waratama 1 merasa sangat bersyukur adanya dana tambahan untuk modal usaha dari Kemensos RI. Dengan demikian mereka dapat memperlancar usaha mereka. Seperti Ibu Kartini yang memiliki usaha membuat kue kering, beliau menggunakan uang tersebut untuk menambah *oven*, sehingga usaha beliau menjadi lancar dan lebih efisien. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan di rumah Ibu Kartini, beliau banyak membuat kue kacang untuk pesanan acara pernikahan. Selain Ibu Kartini, hal tersebut juga

dirasakan oleh Ibu Sri Rejeki yang merupakan bendahara dari KUBE Waratama 1. Beliau bisa menambah mesin jahit dan bisa berjualan kaos online dengan anaknya. Ibu Ngatmini selaku ketua KUBE Waratama 1 juga merasakan hal yang sama, beliau menggunakan uang tersebut untuk membeli tabung gas, sehingga tidak perlu meminjam tabung gas lagi. Sesuai dengan hasil observasi, tabung gas yang berada di rumah Ibu Ngatmini cukup banyak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pendamping, beliau mengatakan dengan adanya KUBE ini telah memenuhi kebutuhan anggota KUBE Waratama 1. Selain meningkatnya pendapatan anggota KUBE Waratama 1, adanya KUBE juga memberikan manfaat lain, antara lain anggota KUBE dapat bersosialisasi, memiliki rasa semangat dalam usaha, menambah jaringan usaha sesama anggota KUBE Waratama 1 dan menambah ilmu dalam manajemen keuangan yang dibimbing oleh pendamping KUBE.

#### **4. Partisipasi dalam Evaluasi**

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Dalam hal ini dalam pencapaian tujuan dari program KUBE, maka dilakukan evaluasi program.

Dalam partisipasi ini kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan secara menyeluruh sehingga perlu adanya evaluasi terhadap suatu program yang telah berjalan (Cohen dan Uphoff dalam (Siti Irene Astuti D (2011: 61-63)).

KUBE Waratama 1 juga melakukan evaluasi pada setiap pertemuan atau rapat satu bulan sekali yaitu setiap tanggal 3. Evaluasi di KUBE Waratama 1 ada 2 macam, yaitu evaluasi secara non formal dan formal. Evaluasi non formal adalah evaluasi yang dilakukan oleh anggota KUBE

Waratama 1 bersama pendamping, dalam evaluasi ini pendamping akan menanyakan kepada anggota saat kegiatan rapat apakah ada kendala atau tidak dalam usaha mereka.

Menurut hasil wawancara dengan anggota KUBE, mereka mengatakan bahwa terdapat perbaikan ketika rapat, jika terdapat masalah dari masing-masing anggota KUBE tentang usaha mereka akan dievaluasi bersama apakah mereka sudah menjalankan usaha mereka dengan benar atau belum. Biasanya yang melakukan evaluasi adalah pendamping yang kemudian akan disusul saran dari anggota lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KUBE, ketua dan bendahara KUBE Waratama 1, mereka mengatakan bahwa terdapat pembuatan laporan selama 1 bulan sekali. Masing-masing anggota KUBE Waratama 1 diharuskan untuk mengumpulkan nota pembelian mereka selama 3 bulan terakhir. Pada saat observasi dilakukan pada tanggal 03 Januari 2016 dan 03 Maret 2016, anggota KUBE Waratama 1 mengumpulkan nota-nota belanja mereka kepada Ibu Sri Rejeki yang merupakan bendahara KUBE Waratama 1.

Hal tersebut juga diperjelas dengan hasil wawancara kepada pendamping KUBE Waratama 1 yaitu Pak Vahis. Terdapat laporan yang harus dibuat oleh KUBE Waratama 1 selama 3 bulan sekali yang akan dievaluasi langsung dari Kementerian Sosial RI.

Selanjutnya adalah evaluasi secara formal, yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia akan datang ke masing-masing rumah anggota KUBE untuk mengevaluasi hasil laporan yang telah dibuat oleh KUBE. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak selalu dilakukan selama 3 bulan sekali, apabila perwakilan dari Kementerian Sosial RI

akan melakukan monitoring dan evaluasi, maka akan mengirimkan surat pemberitahuna terlebih dahulu kepada Dinas Sosial Kota Malang.

## KESIMPULAN

Dalam instrumen indikator dan pengukuran keberhasilan KUBE, terdapat beberapa aspek yang mendasari keberhasilan KUBE, antara lain aspek kelembagaan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Melihat hasil instrumen dan pengukuran keberhasilan KUBE, dalam pelaksanaan program KUBE di KUBE Waratama 1 aspek kelembagaan dan aspek sosial sudah dikatakan berhasil, sedangkan aspek ekonomi masih kurang berhasil.

Partisipasi masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada KUBE Waratama 1 di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ini dianalisis dengan teori dari Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

### 1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi anggota KUBE Waratama 1 dalam pengambilan keputusan cukup optimal, hal tersebut dapat dilihat dari cukup banyaknya anggota KUBE yang mengeluarkan pendapat pada saat rapat KUBE berlangsung, selain itu beberapa anggota juga berani untuk mengatakan ketidaksetujuan mereka terhadap suatu keputusan yang nantinya akan disepakati bersama. Namun, masih terdapat anggota KUBE yang pasif dan tidak pernah menyampaikan pendapat mereka. Kehadiran anggota KUBE dalam rapat yang dilakukan setiap tanggal 3 cukup banyak, dari 10 anggota KUBE yang sering tidak mengikuti rapat KUBE adalah 2 orang. Dan dari 2 orang tersebut masih terdapat 1 anggota yang tidak pernah memberikan alasan yang jelas mengapa beliau tidak bisa hadir.

### 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan KUBE, masyarakat anggota KUBE diharuskan membayar sejumlah uang untuk mengembangkan KUBE

tersebut. Setiap satu bulan sekali mereka harus membayar sebesar Rp. 105.000 dengan rincian Rp. 100.000 untuk mengembalikan pinjaman dan Rp. 5000 sebagai dana inventaris. Selain itu juga terdapat tabungan, yang nominalnya sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing anggota. Namun, anggota KUBE Waratama 1 tidak pernah merasa keberatan dengan adanya iuran tersebut. Untuk partisipasi dalam pelaksanaan khususnya dalam hal keuangan, tidak ditemukan adanya masalah, karena anggota yang tidak hadir tetap membayar dengan cara menitipkan kepada anggota lain atau membayar *double* pada bulan selanjutnya.

### 3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Adanya program KUBE ini sangat bermanfaat bagi anggota KUBE Waratama 1, hal tersebut dibuktikan dengan sebagian besar anggota KUBE Waratama 1 yang mengakui bahwa pendapatan mereka telah meningkat. Mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini. Selain manfaat dalam aspek perekonomian, terdapat beberapa manfaat lain yang bisa didapatkan dalam aspek sosial setelah program KUBE ini berjalan, yaitu:

- a. anggota KUBE Waratama 1 memiliki semangat dalam usaha
- f. anggota KUBE Waratama 1 dapat bersosialisasi
- g. anggota KUBE Waratama 1 dapat menambah jaringan usaha dengan anggota lain
- h. anggota KUBE Waratama 1 dapat menambah ilmu manajemen keuangan mereka

### 4. Partisipasi dalam Evaluasi

Dalam proses evaluasi, masyarakat anggota KUBE Waratama 1 telah berpartisipasi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ketaatan mereka dalam mengumpulkan semua nota pembelian mereka yang akan dikumpulkan selama sebulan sekali kepada bendahara sebagai bahan untuk pembuatan laporan. Laporan tersebut dibuat oleh pendamping KUBE karena keterbatasan pendidikan anggota KUBE Waratama 1. Laporan tersebut akan

dikirim ke Kementerian Sosial Republik Indonesia yang kemudian akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke masing-masing rumah anggota KUBE.

Kesimpulan dari penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sudah cukup optimal, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki kembali.

## SARAN

Hasil penelitian dilapangan telah menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di KUBE Waratama 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang cukup optimal, namun terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti masih terdapat anggota yang sering tidak hadir dalam kegiatan rapat dan masih terdapat anggota yang pendapatannya belum meningkat. Untuk itu peneliti memberikan beberapa saran yang membangun demi keberhasilan program KUBE khususnya pada KUBE Waratama 1 di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yaitu:

1. Perlu adanya koordinasi jadwal rapat kembali bagi KUBE Waratama 1 dengan pendamping supaya semua anggota KUBE Waratama 1 dapat menghadiri rapat
2. Perlu adanya pembentukan kepengurusan kembali bagi KUBE Waratama 1 sehingga tidak terjadi menumpukan tanggung jawab pada satu pihak
3. Perlu adanya sosialisasi kembali mengenai arti penting KUBE dan manfaat yang diperoleh dari adanya KUBE
4. Perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang terjadwal dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia
5. Perlu adanya perhatian lebih dalam hal proses dan evaluasi sehingga anggota KUBE terpacu untuk berpartisipasi
6. Perlu adanya studi banding ke KUBE lain yang sudah berhasil

## DAFTAR PUSTAKA

- HAR, Tilaar. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. RinekaCipta: Jakarta
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Jalal, F. dan Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jogjakarta: Adicita Karya Nusa.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardikanto, T dan Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Pedoman Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2013.
- Sastropoetro, Santoso. R.A. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyah. 2010. *Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates*. Tesis. PPs UNY. Kabupaten Kulon Progo.
- <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/?cat=7>  
Diakses pada 2 Oktober 2015
- <http://keckedungkandang.malangkota.go.id/profil-kedungkandang/> Diakses pada 2 Oktober 2015
- <http://malangkota.go.id/> Diakses pada 4 April 2016
- <http://keckedungkandang.malangkota.go.id/> Diakses pada 4 April 2016
- <http://kelburing.malangkota.go.id/profil/> Diakses pada 5 April 2016